

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada era modern manusia selalu membutuhkan teknologi informasi untuk aktivitas/kegiatan manusia, sehingga perkembangan teknologi informasi menjadi semakin pesat karena disebabkan banyaknya individu, organisasi, perusahaan, atau instansi yang menggunakan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhannya. Karena dengan memanfaatkan teknologi informasi aktivitas/kegiatan yang dilakukan menjadi sangat mudah dan cepat. Sejak berlakunya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan *E-Government*, pemerintah dituntut untuk dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan pelayanan publik berbasis *E-Government*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memetakan elemen kunci keberhasilan pengembangan *e-government* di Kabupaten Purwakarta serta mengidentifikasi permasalahan dalam implementasi *E-Government* sehingga dapat dirumuskan solusi yang tepat (Nugraha, 2018).

Dalam melakukan penyelarasan antara bisnis dan teknologi informasi terdapat sebuah solusi yaitu dengan adanya perancangan serta penerapan *enterprise architecture*. Dengan adanya perancangan dari *enterprise architecture*, perusahaan ataupun organisasi dapat memaksimalkan sistem teknologi informasi dalam membantu pelayanan yang baik terhadap masyarakat maupun pelaku bisnis. Salah satu perusahaan yang memiliki fokus dalam pemberian pelayanan di Kabupaten Purwakarta adalah Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) kabupaten Purwakarta (Assa'diyah, 2021).

Dalam perkembangan teknologi informasi sekarang ini mendorong sistem pemerintahan di Indonesia untuk memperhatikan kondisi eksisting yang sedang berjalan agar terintegrasi antara proses bisnis dan teknologi yang akan digunakan dapat meningkatkan kualitas kerja agar bisa terhubung dengan sistem pemerintahan agar terwujud pelayanan kepada publik yang lebih baik. Penerapan

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau disingkat SPBE yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2018.

Berdasarkan situs resmi milik Kementerian Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Republik Indonesia yaitu menpan.go.id yang menampilkan hasil *United Nations (UN) e-Government Survey 2020* yang merilis peringkat *e-Government Development Index (EGDI)*. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan poin lebih dari 0.75 sebagai *Very High EGDI*, untuk poin 0.50 sampai 0.75 sebagai *High EGDI*, poin 0.25 sampai 0.50 sebagai *Middle EGDI*, dan kurang dari 0.25 sebagai *Low EGDI*. Secara keseluruhan, di tahun 2020 Indonesia mendapat poin EGDI 0.6612 dan masuk ke dalam peringkat *High EGDI*. Berdasarkan hasil tersebut, Indonesia masuk 100 besar peringkat dunia di posisi 88 dari 193 negara yang bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Indonesia berada di atas negara Cambodia dengan poin 0.5113 (*High EGDI*), Timor-Leste dengan poin 0.4649 (*Middle EGDI*), Myanmar dengan poin 0.4316 (*Middle EGDI*), dan Laos dengan poin 0.3288 (*Middle EGDI*) se-wilayah Asia Tenggara. Dengan hasil tersebut juga menunjukkan penerapan SPBE yang dilakukan Pemerintah Indonesia mengalami peningkatan 19 peringkat dari penilaian sebelumnya Indonesia berada pada urutan 107 di tahun 2018 (KemenPANRB, 2020-2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE untuk mengukur tingkat kematangan dari pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (PermenPANRB, 2018). Berikut berisi nilai indeks yang dapat mengukur tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada Tabel I.1 Predikat Indeks SPBE

Table I.1 Predikat Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber : PermenPANRB No.5 tahun 2018

Pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penggambaran arsitektur EA di domain proses bisnis SPBE Kabupaten Purwakarta dengan menerapkan model arsitektur SPBE dan metode TOGAF ADM (*Architecture Development Method*). Penyusunan proses bisnis SPBE mengacu kepada PermenPANRB No. 95 tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis. TOGAF ADM merupakan metode pengembangan EA yang umum dan bisa disesuaikan berdasarkan kebutuhan organisasi serta dapat digabungkan dengan kerangka kerja lain untuk menghasilkan arsitektur yang spesifik. TOGAF memberikan metode yang kompleks mengenai bagaimana cara membangun, mengelola dan meimplementasikan arsitektur *enterprise* yang bisa disebut dengan *Architecture Development Method (ADM)*.

Dengan menggunakan metode ADM maka dapat mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, selain itu juga diharapkan dapat menciptakan rancangan yang akan digunakan untuk membuat sistem baru yang bisa membantu dalam kegiatan perusahaan (Puspasari, Fahrurrozi, Oktawati, & Prima, 2020).

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah bagaimana gambaran Perancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada domain Proses Bisnis berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

I.3 Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan *Enterprise Architecture* Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada domain Proses Bisnis berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

I.4 Batasan Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini yang perlu diperhatikan adalah :

1. Perancangan *Enterprise Architecture* untuk penelitian ini akan berfokus dengan menggunakan TOGAF ADM 9.1 pada domain arsitektur proses bisnis yang fokus pengerjaannya hanya pada fase *Preliminary Phase, Architecture Vision* dan *Business Architecture*.
2. Rencana strategis Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 sebagai acuan dalam pembuatan rancangan EA SPBE pada domain arsitektur proses bisnis di Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Ruang lingkup analisa difokuskan pada visi, misi, tujuan, program prioritas berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.

I.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan pada penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan instansi, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam pengintegrasian proses bisnis dengan pembuatan arsitektur proses bisnis untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, terarah dan terukur di dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Bagi peneliti lain, diharapkan bisa bermanfaat bagi Mahasiswa Sistem Informasi, yang bisa dijadikan bahan referensi dan informasi memberikan suatu pengetahuan dalam melakukan perancangan *Enterprise Architecture* pada suatu perusahaan, instansi atau organisasi.

3. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Penulis mengenai pemanfaatn teknologi perancangan EA SPBE di dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.